



Evaluasi Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana di Kabupaten Pasaman

Taufani Ahmad¹, Roni Ekha Putera^{1*}, Hendri Koeswara¹

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

[*roniekhaputera@soc.unand.ac.id](mailto:roniekhaputera@soc.unand.ac.id)

Article Info

Article history:
Received 20th March 2024
Revised 10th June 2024
Accepted 11th June 2024

Keywords:
Evaluasi Kebijakan
Kebijakan Publik
Manajemen Bencana
Mitigasi Bencana
Kabupaten Pasaman

ABSTRACT

The purpose of this study is to explain the evaluation of disaster management policies in the Pasaman regency. William N Dunn's criteria theory assessment is used in this qualitative descriptive study. The data-gathering methods used were observation, interviews, and documentation. The data analysis strategies are data reduction, data presentation, conclusions, and verification. The findings of this study shows that the objectives of Pasaman Regency's disaster risk reduction strategy have not been met and must be evaluated due to the suboptimal execution of disaster risk reduction activities. The effectiveness instrument revealed that actions, such as drafting contingency plans, had not been implemented, and the objectives of the disaster resistant village (Destana) and disaster awareness group (KSB) activities had not been met, resulting in this risk reduction policy not being enforced adequately. Next, a lack of human resources in terms of competence and funding has prevented various initiatives, such as the sustainability of Destana and KSB, from being implemented, failing to meet efficiency objectives. Next, the adequacy of Pasaman Regency's BPBD, such as the level of success of disaster risk reduction operations carried out, is deemed insufficient to address future issues. Then, it was discovered that the application of this policy did not create an even output in each Nagari that served as the study locus. In terms of the responsiveness of the implementation of the disaster risk reduction policy, which was carried out to elicit a positive response from the community, and finally, in terms of the accuracy of the implementation of this disaster risk reduction policy, it can be concluded that while it was right on target, it was not executed optimally.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. ©2024 by the author(s).



Corresponding Author:

Roni Ekha Putera
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas
roniekhaputera@soc.unand.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara di kawasan Asia-Pasifik yang rentan terhadap bencana alam. Pemerintah dituntut untuk membentuk suatu otoritas dan sistem penanggulangan bencana nasional yang kuat untuk menangani bencana secara efektif. Hal ini sesuai dengan kerangka penanggulangan bencana dari *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*, yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengurangi resiko bencana adalah dengan investasi dalam pengurangan resiko bencana serta meningkatkan rasio luas hutan (Mihardja et al., 2023; Mizuno et al., 2021). Berdasarkan data dari Pusat Informasi Bencana Nasional Indonesia (DIBI) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kecenderungan bencana di Indonesia disebabkan oleh aktifitas dari hidrometeorologi maupun geologi yang terus meningkat. Namun, bencana yang disebabkan oleh geologi, terutama bencana gempa bumi dan tsunami, cenderung menyebabkan kerugian yang lebih besar secara ekonomi dan lingkungan (Gianni et al., 2023; Solorzano et al., 2022). Di sisi lain, bencana dari aktifitas hidrometeorologi disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga bencana banjir bandang sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia selama musim penghujan (Ramadhan et al., 2024; Sinatra et al., 2023). Akibatnya, korban jiwa dan material semakin meningkat karena tidak tersedianya rencana mitigasi dan penanggulangan bencana yang matang.

Dalam hal perundang-undangan, pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa regulasi yang spesifik mengatur tentang aspek kebencanaan. Hal ini merupakan sebuah kemajuan karena memberikan peluang terhadap konsep dan operasional yang menjadi pedoman penanggulangan dan mitigasi bencana (Nursyabani et al., 2020). Di sisi lain, praktik dari proses penanggulangan bencana di Indonesia dinilai masih bersifat parsial kurang responsif dan belum terlembaga dengan baik (Andreastuti et al., 2023; Setyonugroho & Maki, 2023). Hal ini disebabkan oleh kejadian bencana yang terus meningkat, serta kurangnya koordinasi sejak perencanaan, pencegahan dan jalur evakuasi. Akibatnya, penanggulangan bencana tidak terlihat dengan baik atau bersifat bias dan tidak tepat sasaran yang menyebabkan kerugian yang signifikan (Chen et al., 2022; Crossweller & Tschakert, 2021).

Dari sudut pandang kebijakan publik, proses perencanaan, perumusan, implementasi, dan evaluasi program penanganan bencana di Indonesia masih banyak terhambat oleh berbagai masalah (Putera et al., 2016). Termasuk diantaranya adalah kurangnya sosialisasi peraturan, pembentukan lembaga di daerah, sumber anggaran yang terbatas dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penanggulangan bencana. Pemerintah Daerah menjadi lembaga paling depan dalam program penanggulangan bencana dan bertanggung jawab atas wilayahnya (Al-Nammari & Alzaghaf, 2015; Gerber & Robinson, 2009; Putera, 2018). Sehingga Pemda harus memiliki program yang disesuaikan dengan kapasitas, karakteristik geografis dan sosiologis wilayah.

Sehubungan dengan peristiwa dan konsekuensi bencana yang terjadi di Indonesia, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah (Wahyuni et al., 2020). Hal ini sesuai dengan amanah dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa Negara Indonesia bertujuan untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Sejalan dengan hal tersebut, amanah tersebut diturunkan ke dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Kabupaten Pasaman memiliki indeks kerawanan bencana yang tinggi di Sumatera Barat. Bencana yang terjadi di Sumatera Barat antara tahun 2018 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kebencanaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022

No.	Kabupaten/Kota	Tahun					Potensi Bencana
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Agam	209.2	209.2	209.2	193.5	193.5	Tinggi
2	Dharmasraya	143.2	143.2	143.2	137.6	137.6	Sedang
3	Pasaman	178.0	178.0	178.0	176.8	176.8	Tinggi
4	Kota Bukittinggi	130.0	130.0	130.0	130.0	128.0	Sedang
5	Kota Padang	191.6	169.9	169.9	181.7	179.0	Tinggi
6	Kota Padang Panjang	113.2	113.2	113.2	113.2	113.2	Sedang
7	Kota Pariaman	171.2	171.2	171.2	171.2	157.3	Tinggi
8	Kota Payakumbuh	104.8	104.8	104.8	104.8	104.8	Sedang
9	Kota Sawahlunto	113.2	113.2	113.2	113.2	101.0	Sedang
10	Kota Solok	125.2	125.2	125.2	125.2	125.2	Sedang
11	Lima Puluh Kota	119.2	119.2	119.2	119.2	119.2	Sedang
12	Padang Pariaman	184.0	180.7	167.2	156.7	156.7	Tinggi
13	Mentawai	197.2	197.2	197.2	197.2	197.2	Tinggi
14	Pasaman Barat	203.2	203.2	203.2	203.2	203.2	Tinggi
15	Pesisir Selatan	143.2	143.2	143.2	137.7	137.7	Tinggi
16	Sijunjung	107.2	107.2	107.2	107.2	107.2	Sedang
17	Solok	137.2	137.2	137.2	137.2	137.2	Sedang
18	Solok Selatan	137.2	137.2	137.2	137.2	137.2	Sedang
19	Tanah Datar	125.2	125.2	125.2	125.2	125.2	Sedang
IRB Sumbar 2023			144.4			Tinggi	

Sumber: Direktorat Pengurangan Resiko Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1, dari 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat, 11 daerah memiliki indeks risiko bencana sedang, dan 8 memiliki indeks risiko bencana yang tinggi. Kabupaten Pasaman memiliki nilai 176,8 dengan potensi bencana tinggi. Hal ini disebabkan oleh lokasi Kabupaten Pasaman di jajaran patahan Semangka (Sesar Sumatera). Terletak di antara dua segmen aktif, Segmen Sumpur dan Segmen Talamau dan dengan curah hujan rata-rata yang tinggi. Kabupaten Pasaman mengalami banyak bencana, terutama selama musim penghujan.

Wilayah Kabupaten Pasaman terdiri dari tiga kategori topografi, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Ketinggiannya berkisar antara 50 dan 2.340 derajat Celcius. Lerengnya terdiri dari hutan lindung atau kawasan kehutanan seluas 194.088 hektar atau 48,39% dari total luas Kabupaten Pasaman. Selain memiliki curah hujan yang tinggi, setiap kecamatan memiliki 10 sungai besar dan 197 sungai kecil.

Bencana alam seperti tanah longsor dan banjir bandang merupakan bencana tahunan yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Pasaman. Masyarakat terus melakukan penambangan liar di

bagian hulu sungai di beberapa Kecamatan di Kabupaten Pasaman. Selain itu, masyarakat juga melakukan pembukaan lahan hutan untuk pertanian dan perkebunan (seperti jagung dan sawit) di wilayah perbukitan Pasaman. Aktivitas ini dapat meningkatkan potensi risiko bencana di Kabupaten Pasaman.

Gambar 1. Aktifitas Pembalakan dan Pembukaan Lahan Liar di Daerah Perbukitan Kabupaten Pasaman



Sumber: Dokumentasi Penulis

Untuk menanggapi masalah ini, pemerintah Kabupaten Pasaman membuat Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemerintah daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten Pasaman memberikan arahan penuh kepada BPBD Kabupaten Pasaman untuk menyusun dan menerapkan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana. Peraturan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman untuk melakukan penanggulangan bencana yang dapat membahayakan masyarakat.

Selain itu, agenda kebencanaan telah ditetapkan sebagai salah satu dari sepuluh agenda program prioritas dalam visi dan misi Kabupaten Pasaman. BPBD Kabupaten Pasaman bertanggungjawab untuk mengelola bencana secara menyeluruh, sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Nomor 59 Tahun 2011 yang menjelaskan penjabaran tugas dan fungsi serta uraian tugasnya. Peneliti menemukan beberapa masalah di lapangan selama pelaksanaan program pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasaman, seperti rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bencana dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hutan dan lingkungan. Untuk menanggapi masalah ini, BPBD Kabupaten Pasaman telah mengadakan sosialisasi kepada pemerintahan nagari dan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah yang rentan terhadap bencana.

Masalah yang ditemukan meliputi jumlah dan kompetensi sumber daya manusia BPBD Kabupaten Pasaman yang terbatas, kekurangan sarana dan prasarana, dan kekurangan anggaran. Semua masalah ini menyebabkan program pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Pasaman tidak terealisasi dengan baik. Peneliti dalam observasi awal menemukan belum terealisasinya beberapa kegiatan dalam pelaksanaan program pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Pasaman. Hal ini terlihat masih terdapatnya Kecamatan yang belum memiliki satu unsur aktor yang berperan penting dalam penanggulangan bencana seperti

Destana dan Kelompok Siaga Bencana (KSB). Masalah lainnya adalah masih minimnya pelatihan dan pembekalan yang diberikan kepada para anggota KSB serta masih minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Nagari. Selanjutnya ketiadaan rencana kontigensi dalam penanggulangan bencana juga dapat menjadi ancaman bagi masyarakat.

Evaluasi kebijakan penanggulangan bencana adalah langkah penting yang harus segera dilakukan untuk menentukan kebijakan penanggulangan bencana yang efektif dan mencapai tujuan dengan cepat. Penelitian ini membahas evaluasi kebijakan pengurangan risiko bencana oleh BPBD Kabupaten Pasaman sebelum bencana. Peneliti berpendapat bahwa tahapan pra bencana menentukan dampak jangka panjang dari bencana dan harus menjadi prioritas utama pemerintah. Dengan memaksimalkan penanggulangan bencana pada tahap ini, pemerintah dapat mengurangi risiko dan dampak bencana, seperti korban jiwa dan kerugian material lainnya.

Berdasarkan masalah di atas, penelitian ini menggunakan teori analisis kebijakan publik dari Dunn (2015) yang melihat bahwa ada sejumlah kriteria dan indikator dalam proses evaluasi kebijakan, seperti ketepatan, ketepatan, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas. Peneliti menggunakan teori ini karena memiliki relevansi dengan fenomena teoritis dan empiris terkait dengan evaluasi kebijakan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Pasaman. Teori ini juga berguna untuk mencapai hasil yang lebih signifikan melalui penelitian evaluasi. Manajemen strategi yang efektif diperlukan untuk membangun, menerapkan, dan mengevaluasi strategi BPBD Kabupaten Pasaman untuk menangani masalah dan menangani bencana.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami dan mengevaluasi secara keseluruhan kebijakan terhadap pengurangan risiko bencana oleh BPBD Kabupaten Pasaman. Penelitian kualitatif deskriptif dapat menjelaskan dan memahami perilaku dan peristiwa sejumlah orang atau sekelompok orang tentang masalah sosial kemanusiaan. Metode pemilihan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan berdasarkan informasi yang diketahui dan memiliki tanggung jawab terhadap data yang diperoleh oleh penelitian (Creswell, 2009). Di sisi lain, kemampuan kualitatif deskriptif memudahkan peneliti untuk memilih informan yang tepat dan memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan yang relevan dengan penelitian (Strauss & Corbin, 2003).

Peneliti menggunakan bentuk observasi partisipatif yang bersifat pasif (Roque et al., 2024). Peneliti hanya berinteraksi dengan target pengamatan dengan memahami bagaimana pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana serta proses tindak lanjut yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Pasaman. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan informan penelitian. Sedangkan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi berupa literatur buku maupun laporan pelaksanaan tahunan. Peneliti melakukan observasi sejak Oktober 2023 hingga Mei 2024. Lokasi penelitian adalah Nagari-nagari yang memiliki risiko bencana yang tinggi di Kabupaten Pasaman; Nagari Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Nagari Panti Kecamatan Panti, dan Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari. Wawancara penelitian dilakukan kepada beberapa dinas terkait, seperti kepala BPBD Kabupaten Pasaman, kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pasaman, pemerintahan di tiga Nagari tersebut serta kelompok siaga bencana Ladang Panjang di

Kecamatan Tigo Nagari, kelompok siaga bencana Nagari Silayang dan Nagari Muaro Sungai Lolo pada Kecamatan Mapat Tunggul Selatan.

Unit analisisnya adalah lembaga yaitu BPBD Kabupaten Pasaman. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian mengacu kepada teori Miles dan Huberman, yaitu menguji keabsahan data yang didapat di lapangan dengan teknik triangulasi sumber. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah: reduksi data dan penarikan kesimpulan. Proses implementasi program pengurangan risiko bencana di Kabupaten Pasaman dilakukan dengan mendeskripsikan fenomena yang ditemukan di lokasi penelitian serta verifikasi dengan teori evaluasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Kebijakan Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana di Kabupaten Pasaman

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah melihat pengembangan instrumen yang meliputi indikator-indikator efektifitas kebijakan yaitu pelaksanaan dan pencapaian tujuan kebijakan. Upaya penanggulangan bencana oleh BPBD Kabupaten Pasaman memiliki beberapa kebijakan penanggulangan bencana yang dikembangkan dalam beberapa tahapan yaitu: pra-bencana, saat terjadinya bencana serta pasca bencana. Pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan dilakukan sekali lima tahun yang mendukung proses realisasi strategi yang telah ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Pasaman. Kebijakan yang dirumuskan harus bisa mendorong tercapainya strategi serta visi dan misi BPBD Kabupaten Pasaman.

Pada tahapan pra-bencana, BPBD Kabupaten Pasaman memiliki kebijakan peningkatan kesadaran, kemampuan serta kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana. Kebijakan ini direalisasikan dalam bentuk program “pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam”, yang secara keseluruhan ditujukan untuk mencapai tujuan kebijakan dalam penanggulangan bencana. Berikut ini pada tabel 2 ditampilkan susunan kebijakan dan program penanggulangan bencana pada fase pra-bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasaman pada tahun 2018-2023:

Tabel 2. Data Kebencanaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022

Kebijakan
“Peningkatan kesadaran, kemampuan serta kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Pasaman”
Program yang dijalankan
“Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam”
Kegiatan kebijakan
Terlaksananya pencegahan dini dan penanganan bencana alam pada daerah rawan bencana dengan pembuatan peta rawan bencana
Terlaksananya kegiatan pemberian sosialisasi tentang penanggulangan bencana pada masyarakat pada daerah rawan bencana di Kabupaten Pasaman
Terbentuknya nagari siaga bencana/desa tangguh bencana pada setiap Kecamatan di Kabupaten Pasaman
Tersedianya rambu-rambu peringatan bencana pada daerah rawan bencana di Kabupaten Pasaman

Terbentuknya Kelompok Siaga Bencana dan Pembinaan kapasitas Kelompok Siaga Bencana dan Relawan Bencana di Kabupaten Pasaman

Tersusunnya rencana kontinjensi (*contingency plan*) penanggulangan bencana di Kabupaten Pasaman

Sumber: BPBD Kabupaten Pasaman Tahun 2023

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, beberapa kegiatan sudah dilaksanakan oleh pihak BPBD Kabupaten Pasaman akan tetapi masih ada beberapa kegiatan yang belum teralisasi secara maksimal. Hal ini disebabkan karena masih terdapat kecamatan yang belum memiliki satu unsur aktor yang berperan penting dalam penanggulangan bencana seperti Destana dan KSB. Selain itu, permasalahan lainnya adalah masih minimnya pelatihan dan pembekalan yang diberikan kepada para anggota KSB di Nagari karena keterbatasan anggaran.

Kegiatan yang sedang berlangsung sebelum bencana sangat penting karena apa yang telah disiapkan pada saat ini merupakan modal utama dalam menghadapi dan mengatasi bencana alam. Seluruh prosedur pencegahan, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, dan peringatan dini dimasukkan dalam kegiatan pra bencana ini. Antisipasi bencana dan cara mengurangi resiko akan memperkecil dampak bencana. Pemerintah dapat bekerjasama dengan organisasi swasta dan publik. Tujuan dari persiapan ini adalah untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Efisiensi Kebijakan dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana di Kabupaten Pasaman

Dalam penelitian dikembangkan instrumen yang meliputi indikator-indikator efisiensi yaitu sumber daya organisasi yang terdiri dari: sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan pra-sarana yang dimiliki serta instrumen indikator hasil yang ingin dicapai. Dalam menjalankan penanggulangan bencana, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Pasaman saat ini sebanyak 49 orang, dimana tingkat pendidikan personil yang paling rendah adalah SLTA (23 orang), dan tingkat pendidikan tertinggi adalah S1 (26 orang). Dari segi kuantitas jumlah sumber daya manusia yang dimiliki ini sudah cukup, akan tetapi jika dinilai dari segi kualitas dinilai kurang karena banyak personil yang kurang serius dalam melaksanakan tugas dan kurang pemahaman terhadap bidang yang dikelolanya.

Sementara itu, anggaran yang dimiliki oleh BPBD Pasaman berasal dari bantuan pusat yaitu dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman. Anggaran yang diberikan tersebut dirasa tidak mencukupi atau kurang untuk melakukan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana. Dalam proses realisasi anggaran program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, tahun ini BPBD Pasaman mengutamakan kegiatan sosialisasi kepada pemerintah nagari dan masyarakat serta pembentukan Destana pada setiap Kecamatan.

Tabel 3. Anggaran Pelaksanaan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam oleh BPBD Kabupaten Pasaman

Program	Kegiatan	Anggaran
Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Pencegahan dini dengan pengkajian titik-titik daerah lokasi rawan bencana. Pembuatan peta rawan bencana.	30.000.000
	Pemberian sosialisasi tentang penanggulangan bencana pada masyarakat pada daerah rawan bencana di Kabupaten Pasaman.	64.000.000
	Pembekalan Desa Tangguh Bencana pada setiap Kecamatan di Kabupaten Pasaman.	76.000.000
	Pembuatan rambu-rambu peringatan bencana pada daerah rawan bencana di Kabupaten Pasaman.	36.000.000
	Pembinaan kapasitas Kelompok Siaga Bencana dan Relawan Bencana di Kabupaten Pasaman.	114.000.000
	Pengkajian potensi bencana kesetiap daerah dalam proses penyusunan rencana kontinjensi (<i>contingency plan</i>) penanggulangan bencana di Kabupaten Pasaman.	32.000.000
Total		320.000.000

Sumber: LAKIP BPBD Kabupaten Pasaman Tahun 2023

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, BPBD Kabupaten Pasaman masih merasakan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki seperti: alat berat. Alat berat sangat dibutuhkan untuk pembersihan sisa-sisa bencana sehingga proses evakuasi tidak memakan waktu yang lama. Selain itu, banyak nagari yang belum memiliki dan belum pernah mendapatkan bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Padahal nagari tersebut merupakan daerah yang rawan akan bencana. Pihak nagari mengakui bahwa mereka bisa melakukan pembelian sarana dan prasarana dengan menggunakan dana nagari, akan tetapi pemerintah nagari khawatir terkait ketersediaan anggaran untuk program nagari yang lainnya.

Berdasarkan data observasi yang komprehensif dan analisis kualitatif, pelaksanaan strategi penilaian risiko sumber daya manusia di bidang manajemen sumber daya manusia serta sumber daya yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Pasaman adalah relatif baik. Namun, pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi para pegawai masih diperlukan dan dukungan tambahan diperlukan untuk pengelolaan Destana dan KSB dalam kondisi baik. Hal ini berdasarkan pengamatan bahwa setelah program Desa Tangguh Bencana dan KSB didanai oleh pemerintah provinsi dengan menggunakan APBD, selanjutnya program dilakukan di nagari dan terbukti dapat menggunakan dana desa. Di sisi lain, sangat sulit untuk mendanai program Desa Tangguh Bencana yang sedang berjalan karena Nagari perlu berkoordinasi dengan program pembangunan desa lainnya dan memprioritaskan banyak program lain.

Kecukupan Kebijakan dalam Pengurangan Resiko Bencana di Kabupaten Pasaman

Instrumen kecukupan meliputi: keberhasilan kebijakan dan tantangan pada masa yang akan datang. Keberhasilan kebijakan yang dimaksud adalah seberapa besar presentase realisasi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Pasaman. Peneliti menemukan bahwa pihak BPBD Kabupaten Pasaman saat ini belum mempunyai rencana kontingensi karena organisasi ini masih dalam proses penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Sedangkan dalam proses penyusunan rencana kontingensi ini diharapkan akan meliputi sembilan jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Pasaman termasuk pengelolaan bantuan siapa yang harus menangani.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pihak BPBD dalam prosesnya belum melaksanakan kegiatan secara keseluruhan. Masalah terbesar yang mungkin dihadapi adalah kondisi Kabupaten Pasaman yang rawan gempa bumi. Hal ini karena Kabupaten Pasaman terletak di jajaran patahan Semangka (Sesar Sumatera) dan terletak di antara dua segmen aktif; Segmen Sumpur dan Segmen Talamau. Ditambah lagi, ada banyak pembalakan hutan dan penambangan liar yang menyebabkan kerusakan ekosistem dan meningkatkan risiko bencana. Pembukaan lahan hutan yang dijadikan lahan pertanian dan perkebunan juga terjadi di kawasan-kawasan perbukitan di Kabupaten Pasaman. Namun, pembukaan lahan ini mengakibatkan banjir, salah satunya adalah di Kecamatan Lubuk Sikaping, Nagari Durian Tinggi pada bulan Oktober dan Desember tahun 2023. Bencana yang disebabkan oleh manusia ini sangat berpengaruh terhadap manajemen resiko bencana dan perancangan kota di masa depannya (Alazawi et al., 2014).

Gambar 2. Kejadian Banjir Bandang Pada Nagari Durian Tinggi



Sumber: Dokumentasi Peneliti Tahun 2023

Kecukupan BPBD Kabupaten Pasaman seperti tingkat keberhasilan kegiatan pengurangan risiko bencana belum mampu untuk mengatasi tantangan yang mungkin akan terjadi ke depannya. Hal ini disebabkan pembukaan lahan hutan yang dijadikan lahan pertanian dan perkebunan masyarakat pada kawasan-kawasan perbukitan yang dapat meningkatkan risiko bencana.

Selanjutnya, tidak adanya dokumen yang memenuhi persyaratan UU untuk Rencana Kontingensi akan memengaruhi upaya penanggulangan bencana, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan tindakan cepat. Selain itu, banyak bencana besar yang terjadi dalam kurun lima tahun

ini, seperti banjir bandang di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan pada tahun 2020 dan gempa bumi di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan pada tahun 2020.

Rencana Kontigensi merupakan salah satu standar yang dapat digunakan untuk penanggulangan bencana dan mitigasi bencana. Dinamika sosial, seperti pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan lingkungan, yang akan memengaruhi proses perencanaan dan pencegahan bencana saat ini juga harus dipertimbangkan. Untuk mengatasi hal ini, aturan yang jelas, sistematis, dan terorganisir sangatlah penting.

Perataan

Dalam penelitian ini penulis membahas variabel pemerataan dengan menggunakan indikator output kebijakan dan perataan output kebijakan. Output kebijakan dapat dilihat dari tujuan apa saja yang telah tercapai. Dalam konteks pengurangan risiko bencana, pihak BPBD Kabupaten Pasaman memang sudah melaksanakan beberapa kegiatan terkait pengurangan risiko bencana dan merasakan manfaat positif dari proses pelaksanaan kegiatan.

Pihak BPBD Kabupaten Pasaman mulai merasakan manfaat dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana yang sudah dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah Nagari Siaga Bencana (Nagasina) dan KSB yang terbentuk. Sosialisasi juga diberikan kepada aparat pemerintahan Nagari, yaitu melalui upaya pembentukan kelompok siaga bencana pada setiap Nagari serta penguatan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan ekspedisi langsung dan memberikan pembekalan tentang potensi bencana dan bagaimana upaya penyelamatan diri.

Pemerataan hasil output kebijakan pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Pasaman dinilai belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih minimnya output yang dirasakan pada pelaksanaan kegiatan pembentukan Destana. Output yang dirasakan baru sebatas kemudahan dalam hal pelaporan kepada pihak BPBD Kabupaten Pasaman ketika terjadi bencana, akan tetapi dari segi sarana dan prasarana, pihak Nagari belum memilikinya. Hal ini mestinya menjadi perhatian oleh pihak Pemerintah Kabupaten Pasaman mengingat banyak terdapat Nagari yang jauh dari pusat pemerintahan.

Responsifitas

Hasil kebijakan dan kebutuhan masyarakat menjadi variabel responsifitas dari penelitian ini. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, pemerintah tingkat kabupaten/kota memberikan pelayanan sub urusan bencana, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Salah satu kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi adalah bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pasaman harus memiliki kemampuan untuk melindungi masyarakatnya dari bencana.

Selain peningkatan kualitas penanggulangan bencana bagi masyarakat, peneliti juga menemukan bahwa sektor lainnya harus diperhatikan lebih serius dan diselesaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasaman, seperti: pemerataan pembangunan jalan dan pemerataan jaringan komunikasi. Apabila faktor tersebut sudah dikelola dengan maksimal, secara tidak langsung akan memudahkan kegiatan penanggulangan bencana.

Penulis juga menemukan beberapa tradisi lokal (*local wisdom*) yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk merespon terjadinya bencana, diantaranya adalah: penguatan peran niniak mamak dan tokoh pemuda, doa tolak bala, *carito lapau*, cerita rakyat, serta desain bangunan yang tahan bencana pada beberapa daerah di Kabupaten Pasaman.

Permasalahan lainnya yang harus diperhatikan lebih serius lagi oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasaman, adalah: pembangunan fisik tempat tinggal warga pasca terjadinya bencana. Pada beberapa Nagari, permasalahannya adalah pemerataan pembangunan jalan, serta pemerataan jaringan komunikasi yang memilki jarak yang jauh dari pusat pemerintahan.

Ketepatan

Masyarakat yang menjadi target operasi dari pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh BPBD Pasaman sudah merasakan manfaatnya. Hal ini dapat dilihat dari apresiasi pemerintah nagari dan masyarakat yang menjadi target operasi kegiatan. Mengenai pencapaian sasaran kebijakan BPBD, kegiatan sosialisasi tentang penguatan kapasitas nagari dan masyarakat dalam menghadapi bencana dinilai paling efektif. Hal ini terlihat dari banyaknya nagari yang antusias dengan pembentukan kelembagaan destana dan kelompok siaga bencana.

KESIMPULAN

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Penanggulangan bencana dilakukan sebelum, selama, dan setelah bencana. Di Kabupaten Pasaman, BPBD telah menerapkan kebijakan penanggulangan bencana secara menyeluruh ini.

Temuan penelitian ini didasarkan pada evaluasi, yang terdiri dari: efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, rensponsifitas, dan ketepatan. Penelitian ini menemukan bahwa, secara keseluruhan, tujuan kebijakan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Pasaman tidak tercapai dan perlu dievaluasi. Ini disebabkan oleh fakta bahwa prosedur yang digunakan di Kabupaten Pasaman tidak dijalankan dengan cara yang optimal. Instrumen efektifitas menemukan bahwa beberapa kegiatan belum dilaksanakan, seperti pembuatan rencana kontigensi dan belum terbentuknya Destana dan KSB di seluruh kecamatan.

Kebijakan pengurangan risiko belum dilaksanakan sepenuhnya karena kekurangan sumber daya manusia dan anggaran. Selain itu, BPBD Kabupaten Pasaman tidak memiliki kemampuan untuk menangani masalah yang mungkin terjadi di masa depan, terlepas dari tingkat keberhasilan program pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan. Dari penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan ini tidak merata di setiap nagari. Dalam hal responsivitas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan untuk menerapkan kebijakan pengurangan risiko bencana mendapat respons dan tanggapan yang baik dari masyarakat. Terakhir, terkait ketepatan pelaksanaan, kegiatan pengurangan risiko bencana yang dilakukan belum mencapai tingkat optimalnya.

Peneliti menyarankan perlunya revisi dan peninjauan kembali Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang pedoman umum pengkajian resiko bencana. Berdasarkan temuan di lapangan memperlihatkan bahwa kebijakan pengurangan resiko bencana dilaksanakan melalui program Destana dan KSB dengan dana awal oleh pemerintah kabupaten menggunakan APBD. Tindak lanjut program ini hendaknya diserahkan ke nagari dan diarahkan dapat menggunakan dana desa.

Selain itu, pemerintah pusat dan BPBD Kabupaten Pasaman perlu secara maksimal memfasilitasi serta mengakomodasi pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi para pegawainya. Pemerintah juga harus lebih optimal dalam mengawasi perilaku masyarakat, seperti pembalakan liar, penambangan ilegal, dan pembukaan lahan hutan untuk pertanian serta perkebunan di daerah perbukitan yang rawan bencana. Praktik-praktik ini secara signifikan meningkatkan risiko terjadinya bencana di masa mendatang.

Diperlukan pemerataan hasil dari kebijakan pengurangan risiko bencana, seperti penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pelaksana dalam menerapkan kebijakan tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman juga perlu memberikan perhatian lebih terhadap pemerataan pembangunan jalan dan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman, serta mendorong pengembangan dan pelestarian tradisi lokal (kearifan lokal) yang dilaksanakan oleh masyarakat. Langkah-langkah ini secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas penanggulangan bencana dan dapat mengurangi risiko terjadinya bencana. Selain itu, koordinasi dan komunikasi yang konstruktif antara BPBD Kabupaten Pasaman dan OPD-OPD terkait sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas nagari yang tangguh terhadap bencana.

REFERENSI

- Al-Nammari, F., & Alzaghaf, M. (2015). Towards local disaster risk reduction in developing countries: Challenges from Jordan. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 12, 34–41.
- Alazawi, Z., Alani, O., Abdjbar, M. B., Altowaijri, S., & Mehmood, R. (2014). A smart disaster management system for future cities. *Proceedings of the 2014 ACM International Workshop on Wireless and Mobile Technologies for Smart Cities*, 1–10.
- Andreastuti, S. D., Paripurno, E. T., Subandriyo, S., Syahbana, D. K., & Prayoga, A. S. (2023). Volcano disaster risk management during crisis: implementation of risk communication in Indonesia. *Journal of Applied Volcanology*, 12(1), 3.
- Chen, Y., He, S., & Zhou, Z. (2022). Investigation of social media representation bias in disasters: Towards a systematic framework. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 81, 103312.
- Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, 3rd ed. In *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, 3rd ed.* Sage Publications, Inc.
- Croweller, M., & Tschakert, P. (2021). Disaster management and the need for a reinstated social contract of shared responsibility. In *International Journal of Disaster Risk* Elsevier. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420921004015>
- Dunn, W. N. (2015). *Public policy analysis*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=1PE5CgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=leadership+organization+policy+public+service+motivation+good+governance+capacity+building&ots=GtJ_0Syw18&sig=u3VHGonD0bRVX2W1HET2uk-ZCfY
- Gerber, B. J., & Robinson, S. E. (2009). Local government performance and the challenges of regional preparedness for disasters. *Public Performance & Management Review*, 32(3), 345–371.
- Gianni, E., Tyrologou, P., Couto, N., Correia, V., Brondi, S., Panagiotaras, D., & Koukouzas, N. (2023). Natural hazard insurance: dissemination strategies using geological knowledge. *Environment Systems and Decisions*, 43(4), 680–692.
- Mihardja, E. J., Alisjahbana, S., Agustini, P. M., Sari, D. A. P., & Pardede, T. S. (2023). Forest wellness tourism destination branding for supporting disaster mitigation: A case of Batur

- UNESCO Global Geopark, Bali. *International Journal of Geoheritage and Parks*, 11(1), 169–181.
- Mizuno, T., Kojima, N., & Asano, S. (2021). The risk reduction effect of sediment production rate by understory coverage rate in granite area mountain forest. *Scientific Reports*, 11(1), 14415.
- Nursyabani, N., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2020). Mitigasi bencana dalam peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman gempa bumi di universitas andalas. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(2), 81–90.
- Putera, R. E. (2018). Mitigasi Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi Dari Perspektif Implementasi Kebijakan. *Tersedia Dari ZLibrary Database*.
- Putera, R. E., Nurasa, H., & Sugandi, Y. S. (2016). Synergizing stakeholders in reducing risk of earthquake and tsunami-disaster in the most vulnerable area. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 23(3), 5.
- Ramadhan, R., Marzuki, M., Suryanto, W., Sholihun, S., Yusnaini, H., & Muharsyah, R. (2024). Rainfall variability in Indonesia new capital associated with the Madden-Julian Oscillation and its contribution to flood events. *Quaternary Science Advances*, 13, 100163.
- Roque, A., Wutich, A., Brewis, A., Beresford, M., Landes, L., Morales-Pate, O., Lucero, R., Jepson, W., Tsai, Y., & Hanemann, M. (2024). Community-based participant-observation (CBPO): A participatory method for ethnographic research. *Field Methods*, 36(1), 80–90.
- Setyonugroho, G. A., & Maki, N. (2023). Policy implementation model review of the post-disaster housing reconstruction in Indonesia case study: Aceh, Yogyakarta, and Lombok. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 104181.
- Sinatra, T., Nugroho, G. A., Cholianawati, N., Indrawati, A., Renggono, F., Yulihastin, E., Lestari, S., Ahmad, U. A., Widada, W., & Awaludin, A. (2023). Extreme precipitation over complex terrain using multiple remote sensing observation: A case study in the Great Bandung, Indonesia. *Remote Sensing Applications: Society and Environment*, 32, 101058.
- Solorzano, J., Morante-Carballo, F., Montalvan-Burbano, N., Briones-Bitar, J., & Carrion-Mero, P. (2022). A systematic review of the relationship between geotechnics and disasters. *Sustainability*, 14(19), 12835.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (M. terj. Shodiq (ed.)). Pustaka Pelajar.
- Wahyuni, E. S., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2020). Strategi Pemerintah Kota Padang Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Mitigasi Bencana. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 30(1), 49–60.

Peraturan dan Kebijakan

- Kerangka acuan kerja bidang pencegahan dan kesiapsiagaan tahun 2020 BPBD Kabupaten Pasaman.
- Laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) tahun 2023 BPBD Kabupaten Pasaman.
- Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) BPBD Kabupaten Pasaman tahun 2023.
- Laporan rekap kejadian bencana alam 2018-2023 BPBD Kabupaten Pasaman.
- Rencana penanggulangan bencana tahun 2023 BPBD Kabupaten Pasaman.
- Rencana strategis tahun 2022-2026 BPBD Kabupaten Pasaman.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2018 tentang penanggulangan bencana.